

PENGARUSUTAMAAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT

Toni Saputra
NPP. 31.0392

Asdaf Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik
Email : tonisaputra0019@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Muslim, S.Sos, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): This research focuses on the development issues in Majalengka Regency, which have not adequately considered and incorporated landslide risk reduction in their planning. **Purpose:** The objective of this study is to determine the extent of the mainstreaming of landslide risk reduction in Majalengka Regency, West Java Province. **Method:** This research employs a descriptive qualitative method and analysis of the mainstreaming of landslide risk reduction according to Sutiyo & Eva's Theory. Data collection techniques include in-depth interviews (6 informants), observations, and documentation. **Results:** The findings obtained by the authors in this study indicate that the mainstreaming of landslide risk reduction in Majalengka Regency is not functioning well. There are several obstacles, such as insufficient budget, public mindset, and high sectoral ego among institutions. **Conclusion:** The mainstreaming of landslide risk reduction in Majalengka Regency has not been effective. This is due to several unmet dimensions, namely financing, integration, and political will. To enhance the mainstreaming of landslide risk reduction in Majalengka Regency, it is recommended to optimize the use of additional budgets, initiate regular forums or meetings between government agencies, increase public awareness campaigns about the importance of disaster risk reduction, enhance advocacy to local government and relevant institutions, and build strategic partnerships with various parties.

Keywords: Mainstreaming; Disaster Risk Reduction; Landslides.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini berfokus pada permasalahan pembangunan di Kabupaten Majalengka yang kurang memperhatikan dan mempertimbangkan pengurangan risiko bencana tanah longsor dalam setiap perencanaannya. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengarusutamaan pengurangan risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan analisis terhadap pengarusutamaan pengurangan risiko bencana tanah longsor menurut Teori Sutiyo & Eva. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (6 informan), observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:**

Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu pengarusutamaan pengurangan risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Majalengka kurang berjalan dengan baik dan terdapat beberapa hambatan yaitu kurangnya anggaran, mindset masyarakat dan ego sektoral antar instansi yang masih tinggi. **Kesimpulan:** Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Majalengka belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan ada beberapa dimensi yang masih belum terpenuhi yaitu pembiayaan, integrasi serta *political will*. Guna meningkatkan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Majalengka, disarankan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran tambahan, menginisiasi forum atau pertemuan rutin antar instansi pemerintah, meningkatkan kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurangan risiko bencana, meningkatkan advokasi kepada pemerintah daerah dan lembaga terkait serta membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak.

Kata Kunci : Pengarusutamaan; Pengurangan Risiko Bencana; Tanah Longsor.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat rawan mengalami bencana. Dalam laporan World Risk Report 2022 yang dirilis Bündnis Entwicklung Hilft dan IFHV of the Ruhr-University Bochum menyebutkan bahwa Indonesia berada pada peringkat ketiga negara paling rawan bencana di dunia. Menurut Nurjanah (2012) terdapat 3 (tiga) faktor utama penyebab terjadinya bencana antara lain : (1) Faktor alam; (2) Faktor non alam; (3) faktor manusia.

Bencana alam menjadi salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia setiap tahunnya karena terletak pada tiga lempeng utama bumi yaitu Eurasia, Indo-Australia dan Pasifik.. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan 3.544 kejadian bencana alam telah terjadi selama kurun waktu 2022. Dampak bencana alam tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat baik kerugian material maupun korban jiwa. Kerugian material berupa rusaknya rumah dan fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan, peribadatan, kesehatan, kantor maupun jembatan. Sedangkan korban jiwa berupa kematian, hilang, dan luka-luka. Di tahun tersebut, Jawa Barat menjadi provinsi yang paling sering terjadi bencana di Indonesia sebanyak 824 kejadian bencana. Hal ini terjadi karena Provinsi Jawa Barat berdekatan dengan zona subduksi di Kawasan Laut Selatan pulau jawa. Salah satu bencana yang sering terjadi di Jawa Barat adalah bencana tanah longsor sebanyak 542 kejadian.

Daerah yang rawan bencana tanah longsor tersebar di hampir seluruh kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat. Hal ini bisa terjadi karena Provinsi Jawa Barat mempunyai banyak daerah yang mempunyai topografi terjal dan berbukit sehingga menjadi faktor pendorong terjadinya bencana tanah longsor. Salah satu daerah yang rawan terjadi bencana tanah longsor di Jawa Barat adalah Kabupaten Majalengka. Tanah Longsor tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerugian kepada masyarakat tapi juga mengganggu jalannya program pembangunan di Majalengka seperti rusaknya sambungan pipa PDAM dan putusnya akses jalan menuju tempat pariwisata Panyaweyan. Banyaknya kejadian dan kerugian yang ditimbulkan dari tanah longsor merupakan landasan kuat bagi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Majalengka untuk bersama-sama melakukan upaya pengurangan risiko bencana secara terpadu dan terarah. Selain itu sebagai peningkatan fungsi perlindungan, Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu mengarusutamakan pengurangan risiko bencana tanah longsor dalam setiap kegiatan pembangunan dan kebijakan yang dibuat. Dengan demikian, diharapkan dapat terbentuk suatu

kerangka kerja yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mengelola risiko bencana tanah longsor di masa mendatang.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan perencanaan yang matang termasuk memperhatikan pengurangan risiko bencana dalam setiap keputusan atau kebijakan yang diambil sehingga tidak menimbulkan atau terkena dampak dari bencana yang terjadi. Kabupaten Majalengka mempunyai proyek strategis nasional yaitu Tol Cisumdawu dan Bandara Internasional Kertajati sehingga untuk mendukung hal tersebut pemerintah daerah Kabupaten Majalengka akan banyak melakukan pembangunan. Akan tetapi dalam setiap program pembangunan daerah di Majalengka seringkali tanah longsor menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunannya sehingga manfaat yang dirasakan bagi masyarakatnya kurang optimal. Hal tersebut terjadi karena pemerintah Kabupaten Majalengka kurang memperhatikan dan memprioritaskan pengurangan risiko bencana tanah longsor ke dalam perencanaan pembangunan yang dibuat. Salah satu contohnya adalah terputusnya akses jalan ke destinasi wisata Panyaweuyan dan 9000 sambungan transmisi PDAM terputus di Desa Sukadana.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pengarusutamaan pengurangan risiko bencana maupun konteks pengurangan risiko bencana tanah longsor. Penelitian Regina Fortunata, dkk berjudul Pengurangan Risiko Bencana Tanah Longsor Kecamatan Tuter (Regina Fortunata, dkk, 2022), menemukan bahwa risiko bencana di Kecamatan Tuter memiliki tiga kelas risiko bencana tanah longsor yakni rendah, sedang dan tinggi. Hal tersebut menyebabkan kegiatan pengurangan risiko bencana tanah longsor di Kecamatan Tuter menjadi berbeda-beda tergantung kelasnya. Penelitian Rubaidi menemukan bahwa pengurangan risiko bencana (PRB) berbasis integrasi kurikulum pendidikan terbukti secara signifikan bermanfaat dalam disemasi, edukasi, bahkan tindakan praktis dalam penanganan kebencanaan (Rubaidi, 2018). Penelitian Herpita Wahyuni dan Sakir menemukan bahwa pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana Kabupaten Sleman dengan fokus penelitian pada bencana gunung merapi di Kecamatan Cangkring sudah terlaksana dengan cukup baik (Herpita & Sakir, 2021). Penelitian Thomas Sumaryono menemukan bahwa pengurangan risiko bencana belum menjadi arus utama dalam perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (Thomas, 2018). Penelitian Afriyanni menemukan bahwa integrasi aspek pengurangan risiko bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan di Kota Padang telah dilakukan namun belum bersifat sistematis, terpadu dan menyeluruh (Afriyanni, 2019). Penelitian dari Gabriel, dkk menemukan bahwa di Kota-kota Nueva Ecija Filipina telah ada legalitas dan kebijakan tentang pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, namun pelaksanaannya hanya sampai tahap paling awal (Gabriel, dkk, 2021). Penelitian Nizar Fredika Ardhiansah menemukan bahwa pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Nganjuk belum berjalan secara optimal (Nizar, 2022). Penelitian Juhadi, dkk menemukan bahwa pola perilaku masyarakat di wilayah Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan pengetahuan dan sikap masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor (Juhadi, dkk, 2016). Penelitian Putro dan Khaerani menemukan bahwa mitigasi bencana lahan oleh BPBD Purworejo belum maksimal karena belum ada dokumen rencana kontijensi longsor sebagai acuan tindakan, pengetahuan dan sikap masyarakat yang apatis terhadap upaya mitigasi longsor (Putri dan Khaerani, 2017). Penelitian Dzulfikar Hassani menemukan bahwa masyarakat Desa Kertowono menggunakan

tiga kearifan lokal dalam pengurangan risiko bencana tanah longsor yakni slametan desa, istigosah dan kerja bakti (Dzulfikar,2016).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu dimana konteks penelitian yang dilakukan adalah pengarusutamaan pengurangan risiko bencana tanah longsor. Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif dan pendekatan induktif. Selain itu, pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Sutiyo&Eva (2023) yang mempunyai tujuh dimensi yaitu hukum, kelembagaan, pembagian wewenang, pembiayaan, peningkatan kapasitas, integrasi dan *political will*.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengarusutamaan pengurangan risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat.

II. METODE

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif adalah sarana untuk menggali dan memahami makna individu atau kelompok terhadap masalah sosial atau kemanusiaan. Untuk melihat pengarusutamaan pengurangan risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Majalengka, peneliti mengambil pedoman pada teori Sutiyo&Eva dengan tujuh dimensi yaitu hukum, kelembagaan, pembagian wewenang, pembiayaan, peningkatan kapasitas, integrasi dan *political will*. Pada penelitian ini teknik yang digunakan untuk menemukan informasi peneliti adalah “teknik purposive sampling” yaitu data atau informan ditetapkan secara sengaja sesuai dengan maksud dan tujuan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa pejabat terkait di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka guna mengumpulkan data-data yang penulis butuhkan. Observasi dilakukan dengan teknik observasi partisipasi dimana penulis berperan langsung mengamati permasalahan yang terjadi. Selanjutnya dokumentasi, dalam melakukan penelitian ini penulis mendokumentasikan hal-hal yang menurut penulis menunjang dan membantu dalam penyusunan penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis pengarusutamaan pengurangan risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat menggunakan pendapat Sutiyo&Eva yang menyatakan bahwa pengarusutamaan pengurangan risiko bencana adalah suatu proses yang dilakukan untuk menggiring aspek-aspek kebencanaan yang sebelumnya dianggap kurang penting atau marjinal menjadi sesuatu yang penting dan perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan maupun kegiatan utama pemerintah yang terdiri dari tujuh dimensi

yaitu hukum, kelembagaan, pembagian wewenang, pembiayaan, peningkatan kapasitas, integrasi dan political will. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Hukum

Di Kabupaten Majalengka regulasi mengenai penanganan kebencanaan baik dari peraturan bupati maupun pusat sudah ditetapkan bahkan dalam pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 disebutkan pengurangan risiko dipadukan dengan program pembangunan. Akan tetapi meskipun sudah ditetapkan, masyarakat Kabupaten Majalengka masih belum memahami mengenai regulasi-regulasi tersebut.

3.2 Kelembagaan

Terdapat lembaga yang menjalankan fungsi manajemen kebencanaan di Kabupaten Majalengka yaitu BPBD Kabupaten Majalengka yang berkoordinasi dan melakukan kerjasama dengan instansi lain seperti PMI, SAR, Kwarcab dan lain sebagainya. Sedangkan untuk organisasi atau lembaga dibawah naungan BPBD seperti forum pengurangan risiko bencana masih belum terbentuk.

3.3 Pembagian Wewenang

Pembagian wewenang dan tugas terkait penanganan bencana di Kabupaten Majalengka sudah terdistribusikan dengan baik. Instansi – instansi terkait penanganan bencana maupun instansi yang membangun pasca dan pra bencana relative sudah memahami wewenang dan tugas tersebut.

3.4 Pembiayaan

Realisasi anggaran untuk program pengurangan risiko bencana termasuk bencana tanah longsor sudah 100% terealisasi oleh BPBD Kabupaten Majalengka, hanya saja dalam pelaksanaan program-program tersebut anggaran yang tersedia sedikit dan kurang mencukupi sehingga program yang dijalankan kurang optimal. Penganggaran untuk program kebencanaan di Majalengka masih terfokus pada tahap tanggap darurat sehingga anggaran untuk tahap pra-bencana sedikit. Padahal pra-bencana penting untuk meminimalisir risiko dan mencegah bencana terjadi.

3.5 Peningkatan Kapasitas

Pemerintah Kabupaten Majalengka seringkali melaksanakan upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana tanah longsor dengan berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut diantaranya pembuatan dokumen seperti dokumen pengurangan risiko bencana, rencana penanggulangan bencana, rencana kontijensi dan buku saku aman bencana bagi masyarakat, dan melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan bencana tanah longsor. Selain itu upaya mitigasi struktural juga dilakukan bekerjasama dengan instansi lain yang berwenang untuk membangun sarana prasarana yang dimaksud.

3.6 Integrasi

Dimensi integrasi dalam pengarusutamaan pengurangan risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Majalengka belum berjalan dengan optimal yang ditandai dengan masih diabaikannya rekomendasi dari BPBD dan hanya menganggap sebagai formalitas sehingga instansi yang membangun tidak bersungguh-sungguh dalam mengikuti rekomendasi tersebut, serta adanya kejadian tanah longsor yang diakibatkan dari pembangunan lahan parkir di tempat wisata.

3.7 *Political will*

Komitmen kepala daerah dalam pengurangan risiko bencana, khususnya terkait tanah longsor, paling jelas terlihat melalui alokasi anggaran. Namun, anggaran yang diberikan masih terbatas dan minim. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komitmen kepala daerah dalam pengurangan risiko bencana tanah longsor masih kurang, mengingat keterbatasan anggaran yang diberikan.

3.8 **Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Majalengka masih belum berjalan dengan optimal. Hal ini ditandai dengan penemuan penting penulis dalam penelitian ini yaitu terjadinya kejadian tanah longsor di pembangunan lahan parkir wisata Panyaweuyan. Bencana tersebut terjadi karena pihak pengelola wisata tidak memperhatikan potensi bencana dan tidak meminta penilaian atau rekomendasi dari BPBD sehingga tanah longsor terjadi. Hal tersebut menandakan integrasi program pembangunan antar sektor masih kurang baik di Kabupaten Majalengka. Sama halnya dengan temuan dari Nizar bahwa hubungan eksternal dalam pengarusutamaan pengurangan risiko bencana masih belum optimal akibat belum adanya kesepahaman bersama dalam upaya pengurangan risiko bencana (Nizar,2023), integrasi program pembangunan antar instansi merupakan salah satu kunci keberhasilan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana.

3.9 **Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan faktor penghambat pengarusutamaan pengurangan risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Majalengka ini yakni terbatasnya anggaran, mindset masyarakat serta ego sektoral antar instansi yang masih tinggi

IV. **KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa pengarusutamaan pengurangan risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Majalengka belum berjalan dengan optimal karena dari tujuh dimensi tiga diantaranya masih belum terpenuhi yakni dimensi pembiayaan, dimensi integrasi dan dimensi *political will*. Guna melancarkan proses pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Majalengka, disarankan BPBD Kabupaten Majalengka untuk mencari anggaran tambahan dari berbagai sumber, meningkatkan upaya dalam pendidikan dan kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurangan risiko bencana, menginisiasi forum atau pertemuan rutin antar instansi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pengurangan risiko bencana, melakukan advokasi kepada pemerintah daerah dan lembaga terkait serta membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk lembaga penelitian, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi lain yang serupa berkaitan dengan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Majalengka untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanni. (2019). Integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Ke Dalam Rencana Pembangunan Kota Padang. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 14(1), 19–29. <https://jkpjurnal.com/index.php/menu/article/view/4/17>
- Ardhiansah, Nizar Fredika. (2022). Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. http://eprints.ipdn.ac.id/6725/1/RINGKASAN%20SKRIPSI%20%28NIZAR%20FREDIKA%20A_29.0972_J3%29.pdf
- Aulia Mutiara Hatia Putri, “Peringatan RI Masuk 3 Besar Negara Paling Rawan Bencana” <https://www.cnbcindonesia.com/research>
- Bima Bagaskara,” Longsor di Argapura Majalengka, Jalur Wisata Panyaweuyan Terputus” <https://news.detik.com/berita-jawa-barat>
- BNPB, “Infografis Bencana Tahun 2022” <https://www.bnpb.go.id/infografis>
- BNPB.(2023, Maret 1). *Infografis Detail*. Retrieved from BNPB: <https://www.bnpb.go.id/infografis/infografis-bencana-tahun-2022>
- Eviany, E., & Sutiyo. (2023). *Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. Klaten: PT. Nas Media Indonesia.
- Herpita Wahyuni, S. (2021). Mainstreaming Disaster Risk Reduction (DRR) in Disaster Prone Areas Of Sleman. *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)*, 131 - 150. https://www.researchgate.net/publication/341391567_Pengarusutamaan_Pengurangan_Resiko_Bencana_PRB_Di_Daerah_Rawan_Bencana_Kabupaten_Sleman
- Gabriel, A. G., Santiago, P. N. M., & Casimiro, R. R. (2021). Mainstreaming Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation in Comprehensive Development Planning of the Cities in Nueva Ecija in the Philippines. *International Journal of Disaster Risk Science*, 12(3), 367–380. <https://doi.org/10.1007/s13753-021-00351-9>
- Ghassani, Dzulfikar. (2016). Mitgasi Bencana Alam Berbasis Kearifan Lokal Dalam Masyarakat Desa Rawan Bencana. Universitas Airlangga. <https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmntse031413627full.pdf>
- Juhadi, W. S., & Kurniasari, N. (2016). Pola perilaku masyarakat dalam pengurangan resiko

bencana tanah longsor di Kecamatan Banjarwangu Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah. *Jurnal Geografi Media Infomasi Pengembangan Ilmu dan Profesi Kegeografian*. Universitas Negeri Semarang. Volume 13(2), 217- 224. <https://doi.org/10.15294/jg.v13i2.7978>

Nurhidayat, "Info Majalengka: Akibat Longsor Kecamatan Di Majalengka 9000 Sambung Air PDAM Terputus, Begini Penjelasmnya" <https://cirebon.pikiran-rakyat.com/lokal-cirebon>

Nurjanah. (2012). *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta.

Putri, Dumilah Pradapaning, and Thalita Rifda Khaerani. 2017. Strategi Mitigasi Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Purworejo. *Journal Of Public Policy and Management Review* 6 (2): 1–14. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/15567/15059>

Regina Fortunata, Turnining Ayu Rachmawati, Fadly Usman. (2022). PENGURANGAN RISIKO BENCANA TANAH LONGSOR KECAMATAN TUTUR. *Planning for Urban Region and Environment* . <https://purejournal.ub.ac.id/index.php/pure/article/view/433/356>

Rubaidi. (2018). Pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana (PRB). *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian-ISSN*. https://www.researchgate.net/publication/329338343_Pengarusutamaan_Pengurangan_Resiko_Bencana_PRB_Berbasis_Kurikulum_Pendidikan_Agama_Islam

Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumaryono, T. (2018). KAJIAN PENGARUSUTAMAAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. Universitas Gadjah Mada. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/163920#filepdf>

Ulfa, M., Zahroh, S. A., & Inka, A. (2023). Pengurangan Risiko Bencana Tanah Longsor Melalui Mitigasi Bencana Di Desa Sadu Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. *Jurnal Pelita Kota*, 332-344. <https://doi.org/10.51742/pelita.v4i1.757>

Wahyuni, H., & Sakir. (2021). Mainstreaming Disaster Risk Reduction (DRR) in Disaster Prone Areas Of Sleman. *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)*, 131-150. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=xg8tKykAAAAJ&citation_for_view=xg8tKykAAAAJ:u5HHmVD_uO8C